

---

**Analisis Kebijakan Sertifikasi Dan Pengembangan Profesional Guru Di Indonesia:  
Systematic Literature Review**

**Revania Zaniatul Cahaya<sup>1</sup>, Mahpudin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

<sup>a</sup> [revaniacahaya314@gmail.com](mailto:revaniacahaya314@gmail.com) <sup>b</sup> [mahpudin893@gmail.com](mailto:mahpudin893@gmail.com)

\* Corresponding Author

---

Receipt: Artikel dikirim; 1.10.2025 Revision: Artikel diputuskan revisi; 14.12.2025 Accepted: Artikel diputuskan diterima; 15.01.2026

---

**Abstract:**

*This study aims to analyze teacher certification and professional development policies in Indonesia using a Systematic Literature Review (SLR) approach. This study compiles and analyzes previous research on the regulation, implementation, challenges, and impact of teacher certification policies on improving the quality of national education. The research findings indicate that teacher certification policies in Indonesia are based on Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, along with various implementing regulations governing the certification process through the Teacher Professional Education Program (PPG). This program has proven effective in improving teachers' pedagogical, professional, social, and personal competencies, as well as motivating them through professional allowances. However, the implementation of this policy still faces challenges such as uneven distribution, disparities in access to training across regions, and a lack of ongoing support after certification. Therefore, it is necessary to improve the quality of training, ensure equitable access, and strengthen ongoing evaluation to make this policy more effective in enhancing teacher professionalism and the quality of national education across the board.*

**Keywords:** *Teacher certification policy, teacher professional development, teacher competency, teacher professional education*

**Abstrak :**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan sertifikasi dan pengembangan profesional guru di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Penelitian ini menghimpun dan menganalisis penelitian-penelitian terdahulu mengenai regulasi, implementasi, tantangan, dan dampak kebijakan sertifikasi guru terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi guru di Indonesia didasarkan pada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, beserta berbagai peraturannya yang mengatur proses sertifikasi melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program ini terbukti mampu meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan pribadi guru, serta memotivasi mereka melalui tunjangan profesional. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan seperti distribusi yang tidak merata, kesenjangan akses pelatihan di seluruh wilayah, dan kurangnya dukungan berkelanjutan setelah sertifikasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan mutu pelatihan, pemerataan akses, dan penguatan evaluasi berkelanjutan agar kebijakan ini lebih efektif dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan nasional secara merata.*

**Kata kunci :** *Kebijakan sertifikasi guru, pengembangan profesional guru, kompetensi guru, pendidikan profesi guru*

---

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan sangat penting dalam kehidupan dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Ilmu pendidikan memainkan peran yang sangat penting dan merupakan ilmu yang mempersiapkan tenaga pendidik profesional. Kemampuan profesional seorang guru dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran merupakan syarat utama (Aprilia, 2023). Untuk itu memenuhi kebutuhan peningkatan mutu guru, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan kebijakan sertifikasi guru sebagai cara untuk mengakui dan meningkatkan kompetensi guru secara formal. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mengamanatkan bahwa setiap guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sebagai bukti profesionalitasnya. Selain undang-undang ini, kebijakan sertifikasi guru juga diimplementasikan melalui berbagai peraturan pelaksanaan, seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2016 yang menguraikan mekanisme dan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatannya.

Kebijakan sertifikasi untuk guru ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dengan meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan pribadi mereka. Hal ini juga berharap dapat mendorong guru untuk melaksanakan tugas mereka sebagai pendidik dengan menawarkan tunjangan profesional yang adil. Namun, penerapan kebijakan ini menghadapi beberapa tantangan, seperti prosedur yang tidak sesuai, distribusi izin yang tidak merata, dan dampak evaluasi yang tidak memadai terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan (Rahmawati et al., 2025). Permasalahan tersebut mendorong perlunya kajian yang lebih mendalam untuk memahami seberapa efektif dan baik penerapan kebijakan sertifikasi guru di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana regulasi dan bentuk kebijakan sertifikasi guru di Indonesia berfungsi untuk meningkatkan profesionalisme guru; kedua, bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dalam praktik di lapangan; ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan sertifikasi guru; dan keempat, bagaimana kebijakan ini berdampak pada pengembangan profesionalisme guru dan mutu pendidikan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif kebijakan sertifikasi dan pengembangan profesional guru di Indonesia berdasarkan temuan literatur yang ada, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis (SLR) untuk memeriksa, mengidentifikasi, dan menggabungkan penelitian dan literatur yang terkait dengan kebijakan sertifikasi dan pengembangan profesional guru di Indonesia. Metode ini dipilih karena membantu memperoleh pemahaman yang lengkap dan jelas dengan mengumpulkan dan memilih sumber-sumber yang relevan, kemudian menganalisisnya secara terstruktur. Pendekatan ini memastikan diskusi yang transparan dan dapat dipercaya, mencakup aspek-aspek Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap kualitas dan pendidikan guru di Indonesia.

Melalui SLR, peneliti dapat menyajikan ringkasan temuan dan rekomendasi yang mendalam berdasarkan bukti yang kuat (*Systematic Reviews in Educational Research*, 2020). Alur penelitiannya meliputi: 1) identifikasi topik penelitian, 2) penelusuran artikel melalui google scholar dan SINTA, 3) Menyeleksi artikel yang relevan dengan topik, 5) analisis isi artikel sesuai dengan topik penelitian, 6) sintesis temuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan sertifikasi guru di Indonesia merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan berbagai peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2016. Sertifikasi guru merupakan pengakuan formal atas kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan personal yang harus dimiliki guru guna menjamin pembelajaran efektif. Program sertifikasi juga mencakup tunjangan profesi sebagai insentif ekonomi untuk meningkatkan motivasi guru dalam bekerja (Nawawi, 2022).

Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan proses seleksi yang meliputi persyaratan akademik dan uji kompetensi guru (UKG) sebagai syarat utama untuk memperoleh sertifikat pendidik. Peserta PPG harus memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D4 dan mengikuti serangkaian pelatihan dan ujian kompetensi. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) mempunyai dua jenis utama yaitu PPG Prajabatan dan PPG Dalam Jabatan. Program ini dirancang untuk mempersiapkan guru yang profesional dengan memberikan pembelajaran berbasis praktik dan penguatan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial sehingga guru mampu melaksanakan tugasnya secara efektif di kelas (Trilova et al., 2024). PPG Prajabatan diperuntukkan bagi lulusan bergelar Sarjana atau Diploma IV, baik dari bidang kependidikan maupun non kependidikan, yang belum menjadi guru. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan kandidat yang profesional, kompeten, bermoral tinggi, dan siap mengajar untuk jenjang pendidikan formal. Program ini berlangsung selama dua semester dan mencakup kelas, kerja lapangan, proyek kepemimpinan, dan bimbingan. Peserta PPG Prajabatan juga berkesempatan memperoleh beasiswa penuh dari pemerintah, sehingga jalur ini menjadi jalur resmi untuk menjadi guru bersertifikat. Sedangkan PPG Dalam Jabatan diperuntukkan bagi guru yang sudah mengajar tetapi belum memiliki sertifikat guru. Program ini dirancang untuk meningkatkan profesionalisme guru berpengalaman dengan memberikan pelatihan dan panduan yang relevan berdasarkan kebutuhan lapangan. Saat ini, PPG dilaksanakan dengan model pembelajaran campuran (*blended learning*) yang menggabungkan pelatihan daring dan luring (*offline*), sehingga memungkinkan guru di berbagai daerah untuk mengakses program tersebut. Sistem digital juga digunakan dalam administrasi izin sertifikasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pencairan dana. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan seperti distribusi tunjangan yang tidak merata, perbedaan kualitas pelatihan antar lembaga, dan disparitas antara guru di perkotaan dan pedesaan, yang memengaruhi akses dan kualitas program.

Dampak positif kebijakan sertifikasi dapat dilihat dari peningkatan kompetensi guru, terutama dalam pemahaman kurikulum, penggunaan strategi pengajaran yang inovatif,

dan metode pembelajaran aktif yang lebih terstruktur. Sertifikasi tidak hanya memberikan pengakuan formal tetapi juga meningkatkan motivasi guru melalui lisensi profesional yang mereka terima (Diva et al., 2025). Ini juga meningkatkan motivasi finansial dan profesional mereka. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan program PPG, kesiapan lembaga penanggung jawab, dan motivasi peserta untuk mengikuti pelatihan. Perlu adanya evaluasi berkelanjutan dan integrasi yang lebih baik, serta pelatihan antar sesi dan pengalaman kelas praktis, untuk memastikan bahwa kompetensi guru meningkat secara berkelanjutan dan berdampak langsung pada pembelajaran kolaboratif.

No	Penulis/Tahun	Judul Artikel	Temuan/Relevansi dalam penelitian
1.	Nawawi (2022)	Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi, Motivasi dan Kesejahteraan Guru serta Pengaruh Ketiganya terhadap Kinerja Guru	Sertifikasi meningkatkan kompetensi, motivasi, dan kesejahteraan guru, yang berujung pada peningkatan kinerja guru. Ini memperkuat urgensi sertifikasi sebagai kebijakan peningkatan profesionalisme guru.
2.	Anggraheni et al (2024)	Pengembangan profesional guru di sekolah dasar Indonesia dalam konteks kebijakan nasional	Program seperti Guru Penggerak berperan penting dalam memperkuat budaya belajar di sekolah dan mengembangkan kepemimpinan pedagogis adaptif yang mengikuti perkembangan zaman
3.	Trilova et al (2024)	Studi literatur hubungan antara pendidikan profesi dengan program sertifikasi dalam mempersiapkan guru berkualitas	Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) mempunyai dua jenis utama yaitu PPG Prajabatan dan PPG Dalam Jabatan. Program ini dirancang untuk mempersiapkan guru yang profesional dengan memberikan pembelajaran berbasis praktik dan penguatan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial sehingga guru mampu melaksanakan tugasnya secara efektif di kelas.
4.	Diva et al (2025)	Peran sertifikasi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia	Dampak positif kebijakan sertifikasi dapat dilihat dari peningkatan kompetensi guru, terutama dalam pemahaman kurikulum, penggunaan strategi pengajaran yang inovatif, dan metode pembelajaran aktif yang lebih terstruktur. Sertifikasi tidak hanya memberikan pengakuan formal tetapi juga meningkatkan

			motivasi guru melalui lisensi profesional yang mereka terima
5.	Akbar, A. (2021)	Pentingnya kompetensi pedagogik guru	Kompetensi pedagogik seorang guru sangat penting dalam menentukan kualitas keseluruhan mereka. Itulah mengapa seorang guru perlu terus meningkatkan dan mengembangkan kompetensi yang dimilikinya .

Mengembangkan guru profesional setelah sertifikasi menghadirkan tantangan penting. Banyak guru masih belum memiliki akses yang cukup terhadap pelatihan lebih lanjut dan bimbingan teknis, yang berarti pertumbuhan profesional mereka belum mencapai potensi penuhnya. Program seperti Guru Penggerak berperan penting dalam memperkuat budaya belajar di sekolah dan mengembangkan kepemimpinan pedagogis adaptif yang mengikuti perkembangan zaman (Anggraheni et al., 2024). Selain aspek teknis penerapan kebijakan, evaluasi menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih baik tentang kebijakan ini dan pengembangan kapasitas yang lebih kuat bagi lembaga pelaksana lokal. Peran dinas pendidikan dan kepala sekolah sangat penting dalam memberikan informasi dan dukungan kepada guru agar proses sertifikasi berjalan lancar. Integrasi pengelolaan data antara Dapodik dan Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIMPKB) sangat penting bagi keberhasilan penyelenggaraan kebijakan ini.

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini dapat dijawab sebagai berikut. Pertama, regulasi dan bentuk kebijakan sertifikasi guru diatur secara sistematis melalui berbagai instrumen hukum nasional. Kedua, implementasi kebijakan tersebut telah dilakukan melalui program PPG dan manajemen sertifikasi administrasi dengan sistem digital yang memberikan kemudahan akses dan transparansi, meskipun masih menghadapi tantangan teknis dan disparitas wilayah. Ketiga, tantangannya meliputi distribusi lisensi yang tidak merata, perbedaan akses dan kualitas pelatihan di berbagai wilayah, serta kurangnya pengembangan profesional berkelanjutan setelah guru memperoleh sertifikatnya. Keempat, dampak kebijakan ini secara umum positif terhadap peningkatan kompetensi guru, mutu pengajaran, dan motivasi kerja, namun masih diperlukan penyempurnaan implementasi lebih lanjut agar tercapai peningkatan mutu pendidikan nasional yang lebih berimbang dan signifikan. Kebijakan sertifikasi guru dan pengembangan profesional di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan yang didukung oleh landasan hukum yang kuat dan mekanisme pelaksanaan yang terorganisir. Namun, perbaikan berkelanjutan dalam distribusi sumber daya, kualitas pelatihan, dan penguatan pemantauan dan evaluasi harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini sepenuhnya meningkatkan kualitas pendidikan secara seimbang dan berkelanjutan.

## SIMPULAN

Kebijakan sertifikasi dan pengembangan profesional guru di Indonesia telah mencapai

kemajuan yang signifikan dengan regulasi yang kuat dan implementasi yang terstruktur, terutama melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) sejak tahun 2025. PPG dilaksanakan melalui jalur pra-jabatan dan jalur dalam jabatan, yang bertujuan untuk memastikan guru memiliki kompetensi pedagogik, personal, profesional, dan sosial yang dipersyaratkan sesuai standar nasional. Sertifikasi sekarang wajib bagi semua guru formal dan didukung oleh sistem administrasi digital yang meningkatkan transparansi dan kemudahan pemrosesan. Model pembelajaran campuran dalam PPG menawarkan akses kepada guru di berbagai daerah. Meskipun kebijakan ini telah berdampak positif terhadap kompetensi dan motivasi guru, masih ada tantangan dalam memastikan akses yang setara dan pengembangan profesional berkelanjutan. Kebijakan terbaru telah menghapus persyaratan jam tatap muka minimum dan menyesuaikan sistem tunjangan agar lebih memenuhi kebutuhan guru saat ini. Secara keseluruhan, kebijakan ini berfungsi sebagai landasan penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh negeri dengan cara yang adil dan berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

- Nawawi, M. S. (2022). Pengaruh sertifikasi guru terhadap kompetensi, motivasi dan kesejahteraan guru, serta pengaruh ketiganya terhadap kinerja guru (suatu kajian studi literatur review ilmu manajemen sumber daya manusia dan manajemen keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), 323–336. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.878>
- Diva, A. M., Fitria, A. A. A., Rachmawati, R. A. T., & Abdurrahmansyah. (2025). Peran sertifikasi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. *Pedagogik Jurnal Pendidikan*, 20(1), 44–54. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/pedagogik/article/view/9671>
- Trilova, N. M., Purwanti, Y., & Arifin, S. A. (2024). Studi literatur hubungan antara pendidikan profesi dengan program sertifikasi dalam mempersiapkan guru berkualitas. *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, 5(4), 1851–1858. <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i4.3528>
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Kebijakan pengembangan profesi guru* [Dokumen PDF]. <https://konselinghartono.files.wordpress.com/2017/10/kebijakan-pengembangan-profesi-guru2.pdf>
- Somantri, H., Satria, M., Solehudin, O., & Carsiwan. (2024). Pemahaman guru terhadap konsep pedagogik dalam pembelajaran: Sistematis literature review. *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 7(8), 8710–8715. <http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id>
- Muslich, M. (2007). *Program sertifikasi guru dan pengembangan kompetensi guru* [PDF]. (Dikutip dalam kajian teori Bab II). <http://eprints.uny.ac.id/7798/3/bab%20%20-%2008108241071.pdf>
- Akbar, A. (2021). Pentingnya kompetensi pedagogik guru. *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 2(1), 23–30.
- Itje, T. (2021). Analisis kompetensi pedagogik guru kelas IX dalam penerapan kurikulum 2013. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 8(1), 68–81.

- Pramana, A., Fadrul, F., & Priyono, P. (2024). Studi literatur: Peran sertifikasi dalam meningkatkan profesionalitas guru. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(4), 5845-5855. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/954>
- Loughran, J. (2019). Pedagogical reasoning: The foundation of the professional knowledge of teaching. *Teachers and Teaching*, 25(5), 523–535.
- Cahyana, A. (2010). Pengembangan kompetensi profesional guru dalam menghadapi sertifikasi. *Jurnal pendidikan dan Kebudayaan*, 16(1), 85-91.
- Kurniawan, B. D. (2011). Implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam rangka meningkatkan profesionalitas guru di Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemerintahan*.
- ANGGRAHENI, I., HADI, S., & PRISTIANI, R. (2024). Pengembangan profesional guru di sekolah dasar indonesia dalam konteks kebijakan nasional. *PAEDAGOGY: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, 4(4), 590-600.
- Munawir, M., Aisyah, A. N., & Rofi'ah, I. (2022). Peningkatan kemampuan guru melalui sertifikasi. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2), 324-329.
- Aprilia, P. (2023). PENTINGNYA PROFESI GURU DAN PENDIDIKAN DI INDONESIA. *PIWURUK: Jurnal Sekolah Dasar*, 3(2), 91-106.
- Rahmawati, R., Saidina, S., Yuniar, Y., & Junaida, J. (2025). Kebijakan Sertifikasi Profesi Guru. *TOFEDU: Jurnal Pendidikan Masa Depan*, 4 (5), 1510-1516.
- Zawacki-Richter, O., Kerres, M., Bedenlier, S., Bond, M., & Buntins, K. (Eds.). (2020). *Systematic reviews in educational research: Methodology, perspectives and application*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-27602-7>